

LAPORAN KINERJA 2022



**BIRO HUKUM DAN
PENGADUAN MASYARAKAT**



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR



Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan salah satu sarana Pertanggungjawaban dan bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini mendeskripsikan berbagai hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat sepanjang tahun 2022. Pencapaian terhadap sasaran kegiatan dalam Laporan kinerja tahun 2022 ini diharapkan mampu menggambarkan capaian Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat dalam mendukung kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat kepada seluruh pihak yang terkait mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat sehingga dapat memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja tahun berikutnya.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak baik di internal maupun eksternal Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat atas segala dukungan dan kerjasamanya sehingga seluruh kegiatan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Tahun Anggaran 2022 dapat terlaksana dengan baik.



DAFTAR ISI

<i>EXECUTIVE SUMMARY</i>	<i>IV</i>
PENDAHULUAN	1
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
AKUNTABILITAS KINERJA	18
PENUTUP	35

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1. STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT	5
GAMBAR 2.1. PENGHARGAAN TAHUN 2022	20



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Komposisi Jumlah Pegawai Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	6
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran dalam Renstra	10
Tabel 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022	11
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Dumas Tahun 2022	12
Tabel 2.4. Sasaran Program/Kegiatan Bagian Pembentukan Produk Hukum Tahun 2022	14
Tabel 2.5. Sasaran Program/Kegiatan Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum Tahun 2022	15
Tabel 2.6. Sasaran Program/Kegiatan Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) Tahun 2022	16
Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja Biro Hukum dan Dumas Tahun 2022	18
Tabel 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja Biro Hukum Dumas Tahun 2020 s.d 2022	24
Tabel 3.3. Kemajuan Capaian Strategis	26
Tabel 3.4. Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja	28
Tabel 3.5. Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	30
Tabel 3.6. Persandingan Pagu Anggaran Biro Hukum dan Dumas Tahun 2022	32
Tabel 3.7. Realisasi Pengelolaan Anggaran Satker Dewan Selama Tahun Anggaran 2022	33
Tabel 3.8. Realisasi Pengelolaan Anggaran Satker Setjen Selama Tahun Anggaran 2022	33
Tabel 3.9. Capaian Realisasi Anggaran Satker Dewan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Tahun Anggaran 2022	34
Tabel 3.10. Capaian Realisasi Anggaran Satker Setjen Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Tahun Anggaran 2022	34



EXECUTIVE SUMMARY

Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat (Biro Hukum dan Dumas) merupakan unit kerja dibawah koordinasi Deputi Bidang Administrasi yang menunjang kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Biro Hukum dan Dumas mempunyai tugas melaksanakan dukungan di bidang hukum, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, serta pengelolaan pengaduan masyarakat.

Biro Hukum dan Dumas sebagai unit pimpinan pratama memiliki tujuan untuk mendukung terwujudnya visi, misi dan tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI. Bentuk dukungan Biro Hukum dan Dumas dimaksud tergambar dalam Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Indeks kepuasan pengguna layanan bidang hukum;
2. Persentase capaian pembentukan produk hukum; dan
3. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

Dalam mencapai target dalam Indikator Kinerja Utama, Biro Hukum dan Dumas menghadapi isu strategis yang dapat menjadi peluang maupun hambatan antara lain:

- a. Dalam pembentukan produk hukum terdapat tantangan dalam menentukan prioritas yang merupakan kebutuhan yang mendesak, disharmoni substansi antara peraturan yang satu dengan yang lain, dan perkembangan kebutuhan organisasi yang seringkali terlalu cepat berubah.
- b. Penanganan perkara hukum (gugatan) kepada DPR RI ataupun Setjen DPR RI, yang ditangani oleh Biro Hukum dan Dumas, sangat tergantung dengan jumlah perkara hukum yang diterima oleh DPR RI dan Setjen DPR RI, termasuk lokasi dimana perkara hukum (gugatan) tersebut diajukan. Selain itu, penyelesaian atas perkara hukum tersebut sangat tergantung dengan penyelesaian di ranah peradilan yang setiap perkara berbeda-beda waktu penyelesaiannya.
- c. Koordinasi dengan Sekretariat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum optimal karena surat-surat pengaduan masyarakat yang telah diproses oleh Bagian Pengaduan Masyarakat ke



Sekretariat AKD belum ditindaklanjuti dengan adanya pencatatan data oleh Sekretariat AKD ke dalam sistem pengaduan masyarakat sehingga menyulitkan pengadu saat akan melakukan *tracking* surat.

Selanjutnya dalam menghadapi isu strategis dimaksud, Biro Hukum dan Dumas pada tahun 2022 telah melakukan upaya sebagai berikut :

- a. Penetapan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Pembentukan Produk Hukum untuk menjawab tantangan menentukan prioritas kebutuhan pembentukan produk hukum dan mencegah disharmonisasi dengan adanya ketentuan identifikasi dan analisis.
- b. Realisasi Anggaran Satker Dewan tergantung pada perkara yang masuk ke DPR RI, namun dalam melaksanakan penanganan perkara, dilakukan upaya preventif yakni memastikan ketersediaan anggaran dan peningkatan kompetensi hukum.
- c. Penetapan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No.22 Tahun 2022 tentang pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat kepada DPR RI yang diharapkan menjadi solusi tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat oleh Sekretariat AKD.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM

Biro Hukum dan Dumas merupakan unit kerja dibawah koordinasi Deputi Bidang Administrasi yang menunjang kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Biro Hukum dan Dumas mempunyai tugas melaksanakan dukungan di bidang hukum, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, serta pengelolaan pengaduan masyarakat dengan landasan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021, Biro Hukum dan Dumas terdiri dari 3 (tiga) unit kerja yaitu Bagian Pembentukan Produk Hukum, Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum, dan Bagian Pengaduan Masyarakat.

Biro Hukum dan Dumas Setjen DPR RI sebagai Bagian dari instansi Pemerintah diharapkan mampu memberikan hasil capaian kinerja yang optimal dan profesional, sehingga dapat mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai salah satu syarat terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Untuk tercapainya tujuan tersebut, diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi dengan baik dan berkesinambungan yang dimulai dari sistem perencanaan dan program kegiatan, perencanaan anggaran hingga pelaksanaan program dan realisasi anggaran yang harus dikelola dengan baik dan benar, serta



mengedepankan nilai transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, sehingga berorientasi akhir kepada hasil (*result oriented*).

Dalam rangka mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Instansi Pemerintah termasuk Setjen DPR RI perlu menyusun suatu Rencana Strategis yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dalam jangka menengah (5 tahun) dan selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai Kontrak Kinerja serta pada akhirnya dituangkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Kinerja pada setiap tahun berjalan.

Laporan Kinerja Biro Hukum dan Dumas tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus evaluasi kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran sebagai bentuk kewajiban setiap instansi pemerintah yaitu berupa penggunaan seluruh sumber daya yang ada, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran yang terdapat di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang seluruhnya menggambarkan atau menjelaskan sejauh mana capaian kinerja yang dilakukan dalam satu tahun anggaran dengan mengacu kepada sasaran program kegiatan, indikator kinerja dan target yang ditetapkan, serta menjelaskan pula tingkat keberhasilan maupun kegagalan atas kinerja yang dicapai. Dengan demikian Laporan Kinerja selain dapat menjadi bahan evaluasi atas program yang telah direncanakan dalam satu tahun anggaran juga sebagai landasan atau pedoman dalam menyusun perencanaan kegiatan pada tahun tahun berikutnya.

Untuk itu, di dalam Laporan Kinerja Biro Hukum dan Dumas ini selanjutnya akan disampaikan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan Biro Hukum dan Dumas untuk tahun anggaran 2022.



1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.
2. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024.
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021.



1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat merupakan salah satu unit jabatan tinggi pratama di lingkungan Deputi Bidang Administrasi.

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Biro Hukum dan Dumas mempunyai tugas melaksanakan dukungan di bidang hukum, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, serta pengelolaan pengaduan masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, Biro Hukum dan Dumas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

- a. penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Biro Hukum dan Dumas;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan hukum dan pengaduan masyarakat;
- c. pelaksanaan legalisasi produk hukum Sekretariat Jenderal;
- d. pelaksanaan pembentukan dan evaluasi produk hukum;
- e. pelaksanaan pengelolaan pertimbangan dan dokumentasi informasi hukum;
- f. pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- g. dukungan pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional di bidang hukum;
- h. penyusunan laporan kinerja Biro Hukum dan Dumas; dan
- i. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Administrasi.

2. Struktur Organisasi

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Biro Hukum dan Dumas mempunyai tugas melaksanakan dukungan di bidang hukum, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, serta pengelolaan pengaduan masyarakat.

Pasal 184 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Biro Hukum dan Dumas terdiri atas tiga unit kerja yaitu :

- a. Bagian Pembentukan Produk Hukum;
- b. Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum;
- c. Bagian Pengaduan Masyarakat.



Adapun struktur organisasi Biro Hukum dan Dumas dapat disampaikan sebagaimana Gambar 1.1

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat



3. Komposisi Pegawai

Biro Hukum dan Dumas didukung oleh sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan analisis beban kerja dan analisis jabatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berdasarkan data dari Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur, sampai dengan Desember 2022 komposisi jumlah pegawai Biro Hukum dan Dumas mengalami perubahan dari tahun 2021 sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang pegawai, menjadi sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang pegawai, yang terdiri dari pejabat struktural 10 (sepuluh) orang, 16 (enam belas) orang staf pelaksana, serta 7 (tujuh) orang PPN-ASN (Pegawai Pemerintah Non ASN). Secara keseluruhan jumlah 35 (tiga puluh lima) pegawai di Biro Hukum dan Dumas sebagaimana Tabel 1.1.



Tabel 1.1
Komposisi Jumlah Pegawai Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

No	Biro	Pejabat Struktural	Pelaksana	Pejabat Fungsional	PPN-ASN	Jumlah
1.	Biro Hukum	1	0	0	2	3
2.	Bagian PPH	3	4	0	3	10
3.	Bagian PDIH	3	6	0	1	10
4.	Bagian Pengaduan Masyarakat	3	8	0	1	12
	Jumlah	10	18	0	7	35

Sumber : Data Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Desember 2022

Adapun perubahan jumlah Pegawai di Biro Hukum dan Dumas tersebut disebabkan terdapatnya Penambahan Pegawai melalui mekanisme mutasi Pegawai dan mekanisme penerimaan Pegawai Negeri Sipil.

1.4 ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Isu strategis yang dihadapi Biro Hukum dan Dumas pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Dalam pembentukan produk hukum terdapat tantangan dalam menentukan prioritas antara yang sebatas keinginan dengan yang merupakan kebutuhan yang mendesak, disharmoni substansi antara peraturan yang satu dengan yang lain, dan perkembangan kebutuhan organisasi yang seringkali terlalu cepat berubah.
2. Permasalahan formil dalam pembentukan produk hukum yaitu yang terkait dengan proses pengusulan (kualitas identifikasi, analisis kebutuhan, dan penentuan prioritas pembentukan produk hukum), pembahasan (mekanisme pembahasan produk hukum) dan pasca penetapan (sosialisasi dan evaluasi).



3. Penanganan perkara hukum (gugatan) kepada DPR RI ataupun Setjen DPR RI, yang ditangani oleh Biro Hukum dan Dumas, sangat tergantung dengan jumlah perkara hukum yang diterima oleh DPR RI dan Setjen DPR RI, termasuk lokasi dimana perkara hukum (gugatan) tersebut diajukan. Selain itu, penyelesaian atas perkara hukum tersebut sangat tergantung dengan penyelesaian di ranah peradilan yang setiap perkara berbeda-beda waktu penyelesaiannya.
4. Terintegrasinya sistem JDIH Setjen DPR RI dengan JDIHN yang dikelola oleh BPHN terhitung sejak tanggal 9 Juni 2021, menimbulkan konsekuensi untuk mempercepat pengembangan JDIH berupa inovasi fitur atau menu-menu baru yang dapat membantu para *stakeholders* atau pemangku kepentingan untuk mendapatkan layanan informasi dokumentasi dan informasi hukum yang lebih cepat, efisien dan optimal.
5. Diperlukan koordinasi yang lebih intensif dengan Anggota JDIH Setjen DPR RI, sehingga pemberian layanan informasi dan dokumen hukum dapat terintegrasi satu pintu melalui Website JDIH Setjen DPR RI dimana Biro Hukum dan Dumas dalam hal ini sebagai koordinator.
6. Pengembangan JDIH Setjen DPR RI yang telah terintegrasi dengan JDIHN saat ini tidak didukung oleh terpenuhinya jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum.
7. Tindak lanjut surat-surat pengaduan masyarakat yang telah dianalisa dan ditangani oleh Bagian Dumas belum dilakukan sebagaimana yang diharapkan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD), mengingat hal tersebut merupakan sepenuhnya kewenangan Pimpinan dan AKD DPR RI.
8. Penanganan pengaduan masyarakat melalui aplikasi pengaduan masyarakat masih terkendala pada sistem, sehingga pengelolaannya belum dapat dilaksanakan secara optimal.
9. Koordinasi dengan Sekretariat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum optimal karena surat-surat pengaduan masyarakat yang telah diproses oleh Bagian Pengaduan Masyarakat ke Sekretariat AKD belum ditindaklanjuti dengan adanya pencatatan data oleh Sekretariat AKD ke dalam sistem pengaduan masyarakat sehingga menyulitkan pengadu saat akan melakukan *tracking* surat.



10. Belum optimalnya koordinasi dengan unit kerja yang membidangi dan menangani pengaduan masyarakat secara langsung dan unit kerja yang membidangi pengamanan dalam mengimplementasikan pedoman pengelolaan pengaduan masyarakat.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Biro Hukum dan Dumas sebagai unit pimpinan pratama memiliki tujuan untuk mendukung visi, misi dan tujuan Sekretariat Jenderal DPR RI yang tertuang dalam Persekjen Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 18 Tahun 2021. Visi Setjen DPR RI adalah ***"Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia"***.

Sedangkan Misi Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2020 – 2024 adalah :

1. Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi diatas, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai sampai dengan tahun 2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian yang prima bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional, baik, dan bersih; dan
3. Terwujudnya pusat data dan informasi legislasi yang lengkap.



Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran dalam Renstra

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada 2020	Target Kinerja Pada 2021	Target Kinerja Pada 2022	Target Kinerja Pada 2023	Target Kinerja Pada 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kualitas Dukungan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	Indeks kepuasan pengguna layanan bidang hukum	-	3,07	3,10	3,20	3,30
		Persentase capaian pembentukan produk hukum	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021.

Sasaran meningkatnya kualitas dukungan Biro Hukum dan Dumas untuk mendukung tujuan terwujudnya dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian yang prima bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Indikator Kinerja dengan Target Kinerja tahunan dilaksanakan oleh masing-masing Bagian di Biro Hukum dan Dumas dengan rincian sebagai berikut :

- a. Untuk mencapai indeks kepuasan pengguna layanan bidang hukum dengan target hingga Tahun 2024 sebesar 3,30, didukung sasaran/program kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum. Sasaran/program kegiatan Pada Tahun 2022 yang meliputi terlaksananya pembentukan produk hukum sesuai target, terlaksananya layanan pertimbangan Hukum sesuai dengan target yang ditetapkan, terlaksananya layanan advokasi Hukum sesuai dengan target yang ditetapkan, dan terlaksananya layanan Dokumentasi Informasi Hukum sesuai dengan target yang ditetapkan.



- b. Persentase capaian pembentukan produk hukum dengan target hingga Tahun 2024 sebesar 100%, didukung sasaran/program kegiatan yang dilaksanakan Bagian Pembentukan Produk Hukum di Tahun 2022 yang meliputi tercapainya perumusan produk hukum sesuai target, dan tercapainya evaluasi produk hukum sesuai target.
- c. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dengan target hingga 2024 sebesar 100%, didukung sasaran/program kegiatan yang dilaksanakan Bagian Pengaduan Masyarakat di Tahun 2022 yang meliputi tercapainya penyelesaian analisa aspirasi dan pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada DPR untuk disampaikan kepada AKD terkait, dan terlaksananya layanan administrasi atas pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada DPR.

2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang termuat dalam Rencana Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Biro Hukum dan Dumas memiliki Rencana Kinerja Tahun 2022 sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Terwujudnya dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian yang prima bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Meningkatnya kualitas dukungan Hukum dan Pengaduan Masyarakat	Indeks kepuasan pengguna layanan bidang hukum	Indeks	3,07
			Persentase capaian pembentukan produk hukum	Persentase	100 %
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti;	Persentase	100 %



		Persentase realisasi anggaran Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	Persentase	92 %
--	--	---	------------	------

Sumber : Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2022

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dokumen Penetapan Kinerja (PK), maka ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai bagian dari capaian kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI telah menetapkan PK untuk Biro Hukum dan Dumas sesuai dengan indikator yang telah disempurnakan.

PK Biro Hukum dan Dumas yang disempurnakan merupakan sasaran program/kegiatan gabungan untuk satuan kerja Dewan dan satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. PK yang telah dilakukan revisi tersebut disampaikan secara keseluruhan yang merupakan satu sasaran program/kegiatan Biro Hukum dan Dumas dengan 4 (empat) indikator kinerja sebagaimana pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Dumas Tahun 2022

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas dukungan Hukum dan Pengaduan Masyarakat	Indeks kepuasan pengguna layanan bidang hukum	Indeks	3,09
		Persentase capaian pembentukan produk hukum	Persentase	100 %
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti;	Persentase	100 %



NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
		Persentase realisasi anggaran Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	Persentase	92 %

Dalam Tabel Rencana Strategis pada Tabel 2.1 dan Tabel Rencana Kinerja Tahun 2022 pada Tabel 2.2, terdapat perbedaan indikator kinerja dengan Perjanjian Kinerja pada Tabel 2.3. Tabel Rencana Strategis sebagaimana terdapat pada Tabel 2.1 merupakan rencana 5 (lima) tahun yang disusun untuk tingkat Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sehingga di dalamnya tidak memasukkan realisasi penggunaan anggaran sebagai indikator kinerja. Rencana Kinerja sebagaimana terdapat pada Tabel 2.2 diusulkan pada tahun 2021 sebelum tahun berjalan 2022 untuk digunakan sebagai dasar penyusunan pagu anggaran tahun 2022. Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.3 merupakan target yang menjadi tujuan pencapaian pada tahun 2022.

Selain terdapat perbedaan indikator kinerja dalam Tabel Rencana Strategis pada Tabel 2.1 dan Tabel Rencana Kinerja Tahun 2022 pada Tabel 2.2, terdapat pula perbedaan target salah satu indikator kinerja dengan Perjanjian Kinerja pada Tabel 2.3 yaitu Indeks kepuasan pengguna layanan bidang hukum. Perbedaan nilai indeks yang menjadi target disebabkan perbedaan basis data yang digunakan dalam penyusunan target. Dalam Rencana Strategis sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.1 yang menjadi fokus utama adalah target pada akhir Rencana Strategis yaitu tahun 2024. Kemudian, target dalam Rencana Kinerja dicantumkan berdasarkan capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2021. Adapun target yang menjadi acuan Biro Hukum dan Dumas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun 2022 adalah yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja pada Tabel 2.3.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Biro Hukum dan Dumas terdapat 2 (dua) penambahan indikator kinerja yaitu terselenggaranya Manajemen Perkantoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terselenggaranya Direktif Pimpinan. Penambahan Indikator Kinerja tersebut untuk optimalisasi sasaran/program kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kinerja Tahun 2022 dalam hal ketatausahaan di masing-masing Bagian dan pelaksanaan pembangunan zona integritas di Biro Hukum dan Dumas. Indikator Kinerja



tambahan tersebut dituangkan dalam Pengisian Sasaran Kinerja Pegawai pada Aplikasi E-Kinerja Badan Kepegawaian Negara Tahun 2022.

Guna mencapai Indikator Kinerja pada Rencana Kinerja Tahun 2022, ditetapkan sasaran program/kegiatan di Bagian Pembentukan Produk Hukum, Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum, dan Bagian Pengaduan Masyarakat, sebagaimana tercantum pada Tabel 2.4 , Tabel 2.5 dan Tabel 2.6.

Tabel 2.4

Sasaran Program/Kegiatan Bagian Pembentukan Produk Hukum Tahun 2022

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya pembentukan produk hukum sesuai target	Laporan pelaksanaan kegiatan perumusan produk hukum sesuai target	dokumen	1 Dokumen
		Laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi produk hukum sesuai target	dokumen	1 Dokumen
3	Tercapainya perumusan produk hukum sesuai target	Perumusan peraturan sekjen	dokumen	10 Dokumen
		Perumusan MoU dan/atau Perjanjian	dokumen	2 Dokumen
		Perencanaan kebijakan agenda <i>setting</i> dan formulasi kebijakan	dokumen	1 Dokumen
4	Tercapainya evaluasi produk hukum sesuai target	Identifikasi dan analisis usulan Persekjen	dokumen	10 Dokumen
		Evaluasi produk hukum	dokumen	6 Dokumen



NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
		Pemetaan regulasi	dokumen	1 Dokumen
5	Terlaksananya realisasi anggaran Bagian Pembentukan Produk Hukum sesuai target.	Dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran	dokumen	1 Dokumen
		Dokumen realisasi anggaran	dokumen	1 Dokumen
6	Terselenggaranya ketatausahaan Bagian Pembentukan Produk Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Laporan Tata Usaha	dokumen	1 Dokumen
7	Terselenggaranya pelaksanaan Zona Integritas sesuai program kerja.	Dokumen pelaksanaan Zona Integritas sesuai dengan Program Kerja	dokumen	1 Dokumen

Tabel 2.5

**Sasaran Program/Kegiatan Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum
 Tahun 2022**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya layanan pertimbangan Hukum sesuai dengan target yang ditetapkan	Laporan Hasil Pertimbangan Hukum	Dokumen	1 Dokumen
2	Terlaksananya layanan advokasi Hukum sesuai dengan target yang ditetapkan	Laporan Advokasi Hukum	Dokumen	1 Dokumen
3	Terlaksananya layanan Dokumentasi Informasi Hukum sesuai dengan target yang ditetapkan	Laporan Dokumentasi Informasi Hukum	Dokumen	1 Dokumen



NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
4	Terlaksananya realisasi anggaran Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum sesuai dengan target yang telah ditetapkan	Laporan Realisasi Anggaran Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum	Dokumen	1 Dokumen
5	Terselenggaranya Ketatausahaan Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum	Laporan Ketatausahaan Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum	Dokumen	1 Dokumen
6	Tercapainya penguatan sistem regulasi nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Laporan Pengelolaan <i>Website</i> JDIH	Dokumen	1 Dokumen
7	Terselenggaranya pelaksanaan Zona Integritas sesuai dengan Program Kerja	Dokumen pelaksanaan Zona Integritas sesuai dengan Program Kerja	Dokumen	1 Dokumen

Tabel 2.6

Sasaran Program/Kegiatan Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) Tahun 2022

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tercapainya penyelesaian analisa aspirasi dan pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada DPR untuk disampaikan kepada AKD terkait	Dokumen penyelesaian analisa aspirasi dan pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada DPR dan Setjen untuk disampaikan kepada AKD terkait	Dokumen	4
2	Terlaksananya layanan administrasi atas pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada DPR	Dokumen layanan administrasi atas pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada DPR dan Setjen	Dokumen	4



NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
3	Terlaksananya realisasi anggaran Bagian Pengaduan Masyarakat sesuai dengan target yang ditetapkan	Dokumen realisasi anggaran Bagian Pengaduan Masyarakat sesuai dengan target yang ditetapkan	Dokumen	7
4	Terselenggaranya ketatausahaan Bagian Pengaduan Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dokumen ketatausahaan Bagian Pengaduan Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dokumen	3
5	Terselenggaranya layanan Pengaduan Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dokumen layanan Pengaduan Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Dokumen	2
6	Terselenggaranya pelaksanaan Zona Integritas sesuai dengan Program Kerja	Dokumen pelaksanaan Zona Integritas sesuai dengan Program Kerja	Dokumen	1



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Setiap instansi pemerintah perlu melakukan pengukuran kinerja untuk membuktikan akuntabilitas kinerjanya. Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh instansi pemerintah.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Hukum dan Dumas Tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam Tahun 2022.

3.1 CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Hukum dan Dumas Tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan PK dengan realisasinya. Untuk seluruh sasaran program, indikator kinerja program, target, realisasi dan capaian Biro Hukum dan Dumas Tahun 2022 dapat ditampilkan pada Tabel 3.1 berikut.



Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Biro Hukum dan Dumas Tahun 2022

No.	Sasaran Program/Outcome	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (Realisasi/Target x 100)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas dukungan Hukum dan Pengaduan Masyarakat	Indeks kepuasan pengguna layanan bidang hukum	3,09	3,20	103%
		Persentase capaian pembentukan produk hukum	100 %	100%	100%
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100%	100 %
		Persentase Realisasi Anggaran Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat (Satker Dewan)	92 %	99,77	108%
		Persentase Realisasi Anggaran Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat (Satker Setjen)	92 %	99,85	108%



Dari Tabel 3.1 diatas, dapat dilakukan analisis penilaian Realisasi Kinerja dengan skala peringkat kinerja yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sesuai interval nilai realisasi kinerja, Biro Hukum dan Dumas memiliki capaian realisasi pada interval nilai $91\% \leq 100\%$, yang masuk Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja **Sangat Tinggi**. Perbandingan antara Target, Realisasi, dan Capaian pada Tabel 3.1. tersebut juga menunjukkan bahwa Biro Hukum dan Dumas berhasil mencapai realisasi **melebihi target**.

Selain capaian yang merupakan target yang telah ditetapkan dalam sasaran program/kegiatan dalam Perjanjian Kinerja, Biro Hukum dan Dumas juga memperoleh penghargaan sepanjang tahun 2022. Penghargaan-penghargaan yang diperoleh antara lain:

1. Penerima Penghargaan Raihan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik I Satker Dewan Triwulan II Tahun Anggaran 2022;
2. Penerima Penghargaan Raihan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik II Satker Dewan Triwulan III Tahun Anggaran 2022; dan
3. Penerima Penghargaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Terbaik Kedua Tahun 2022.



Gambar 2.1. Penghargaan Tahun 2022

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Perbandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja

Berdasarkan angka capaian sasaran program dan kegiatan yang telah direalisasikan pada Tahun 2022 untuk Biro Hukum dan Dumas, menunjukkan bahwa Biro



Hukum dan Pengaduan Masyarakat berhasil mencapai realisasi melebihi target. Meskipun demikian, perlu dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja. Pendekatan evaluasi dan analisis ini untuk mengukur seberapa besar tingkat capaian kinerja sasaran program dan kegiatan pada Tahun 2022. Hal ini dilakukan sebagai metode untuk mencermati kinerja yang telah dilakukan dengan cara membandingkan target dengan capaian/realisasi sebagai bahan untuk menilai kinerja suatu organisasi pada Biro Hukum dan Dumas.

Berdasarkan Tabel Pengukuran Kinerja Biro Hukum dan Dumas Tahun 2022, setiap Indikator Kinerja Program didukung dengan rencana hasil kerja masing-masing Bagian di Biro Hukum dan Dumas, sebagai berikut:

1. Biro Hukum dan Dumas telah menyelenggarakan survei Kepuasan Masyarakat untuk menilai kepuasan pengguna layanan hukum dengan hasil survei kepuasan pengguna terhadap dukungan layanan hukum Biro Hukum dan Dumas yaitu **sebesar 3,20**. Unsur yang memperoleh Indeks tertinggi terdapat pada unsur produk layanan yaitu 82,00 (delapan puluh dua koma nol nol). Sedangkan unsur yang memperoleh nilai terendah adalah waktu penyelesaian layanan yang memperoleh indeks kepuasan 77,50 (tujuh puluh tujuh koma lima puluh). Perolehan nilai hasil survei kepuasan pengguna terhadap dukungan layanan hukum Biro Hukum dan Dumas telah melebihi target indeks kepuasan pengguna layanan bidang hukum yang ditetapkan tahun 2022 sebesar 3.09.
2. Pencapaian indeks kepuasan pengguna layanan bidang hukum sebesar 3,20 didukung hasil kegiatan yang dilaksanakan Bagian Pembentukan Produk Hukum dan Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum di Tahun 2022.
3. Adapun hasil kegiatan Bagian Pembentukan Produk Hukum yang mendukung tercapainya indeks kepuasan pengguna layanan hukum adalah terlaksananya kegiatan pembentukan produk hukum sesuai target dengan hasil kerja Laporan pelaksanaan kegiatan perumusan produk hukum sesuai target sebanyak 1 (satu) dokumen dan laporan pelaksanaan kegiatan evaluasi produk hukum sesuai target sebanyak 1 (satu) dokumen.

Kemudian hasil kegiatan Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum yang mendukung tercapainya indeks kepuasan pengguna layanan hukum adalah sebagai berikut:



- a. Terlaksananya layanan pertimbangan Hukum sesuai dengan target yang ditetapkan dengan hasil kerja Laporan Hasil Pertimbangan Hukum. Target kinerja 1 Dokumen Laporan, yang terdiri atas rekapitulasi layanan pemberian pertimbangan hukum atas Keputusan Sekretaris Jenderal (2212 Dokumen), Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (54 Dokumen), Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (246 Dokumen), Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang (72 Dokumen), pertimbangan hukum atas permasalahan Sekretariat Jenderal (8 Dokumen) dan pertimbangan hukum atas permasalahan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (6 Dokumen).
 - b. Terlaksananya layanan advokasi Hukum sesuai dengan target yang ditetapkan, dengan hasil kerja Laporan Advokasi Hukum (1 Dokumen), yang berisi rekapitulasi pemberian advokasi sebanyak 5 (lima) perkara advokasi.
 - c. Terlaksananya layanan Dokumentasi Informasi Hukum sesuai dengan target yang ditetapkan, dengan hasil kerja Laporan Dokumentasi Informasi Hukum (1 Dokumen).
 - d. Tercapainya penguatan sistem regulasi Nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan hasil kerja Laporan Pengelolaan *Website* JDIIH (1 Dokumen).
 - e. Terselenggaranya pelaksanaan Zona Integritas sesuai dengan Program Kerja, dengan hasil kerja Dokumen pelaksanaan Zona Integritas sesuai dengan Program Kerja (1 Dokumen).
4. Tercapainya persentase capaian pembentukan produk hukum dengan target hingga 2024 sebesar 100% didukung dengan hasil kegiatan yang dilaksanakan Bagian Pembentukan Produk Hukum di Tahun 2022 yang meliputi tercapainya perumusan produk hukum sesuai target dan tercapainya evaluasi produk hukum sesuai target.

Adapun Peraturan Sekretaris Jenderal yang ditetapkan pada tahun 2022 sebanyak 24 (dua puluh empat) peraturan. Selain itu telah dihasilkan 10 (sepuluh) dokumen evaluasi produk hukum. Kemudian telah ditetapkan 31 (tiga puluh satu) dokumen identifikasi dan analisis. Selanjutnya telah selesai disusun 50 (lima puluh) dokumen MoU/perjanjian.



5. Capaian persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti sebesar 100% didukung dengan sasaran/program kegiatan yang dilaksanakan Bagian Pengaduan Masyarakat di Tahun 2022 yang meliputi tercapainya penyelesaian analisa aspirasi dan pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada DPR untuk disampaikan kepada AKD terkait, dan terlaksananya layanan administrasi atas pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada DPR

Dalam Perjanjian Kinerja Bagian Pengaduan Masyarakat, terdiri dari laporan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat dengan target 1 Dokumen, laporan pengembangan layanan aspirasi dan pengaduan masyarakat dengan target 1 dokumen, laporan tata usaha dengan target 12 dokumen, dan rencana kerja dan anggaran bagian pengaduan masyarakat dengan target 4 dokumen. Keempat indikator tersebut dapat terealisasi sesuai dengan target, yaitu 100% (seratus persen).

Analisis surat pengaduan masyarakat yang diteruskan/disampaikan kepada DPR RI dan Setjen tahun 2022 sesuai dengan jumlah surat yang masuk sebanyak 5.266 (lima ribu dua ratus enam puluh enam) surat, terdiri atas surat pengaduan masyarakat secara tertulis 4750 (empat ribu tujuh ratus lima puluh) surat dan pengaduan masyarakat secara online 516 (lima ratus enam belas) surat, sedangkan surat kepada Setjen sebanyak 4 (empat) surat dan SP4N LAPOR! sebanyak 13 (tiga belas) surat. Analisis surat pengaduan masyarakat yang diteruskan/disampaikan kepada DPR RI tahun 2022 sebanyak 5.266 surat atau 100% sedangkan surat kepada Setjen sebanyak 4 (empat) surat dan SP4N LAPOR! sebanyak 13 surat atau masing-masing 100% (seratus persen).

6. Tercapainya indikator kinerja persentase realisasi anggaran Biro Hukum dan Dumas didukung dengan tersedianya Laporan Realisasi Anggaran masing-masing bagian di bawah Biro Hukum dan Dumas. Selain itu persentase realisasi anggaran Biro Hukum dan Dumas didukung dengan tersedianya Laporan ketatausahaan masing-masing bagian di bawah Biro Hukum dan Dumas, yang berisi 12 (dua belas) Laporan Tata Usaha Per Bulan.



7. Selain kegiatan yang dilakukan oleh bagian-bagian di bawah Biro Hukum dan Dumas tercapainya target kinerja Biro Hukum dan Dumas juga tidak lepas dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Dumas yaitu peningkatan kapasitas analis hukum dan sosialisasi Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI.

2. Perbandingan Capaian Kinerja

Perbandingan capaian kinerja Biro Hukum dan Dumas Tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian kinerja pada tahun 2022 dengan capaian kinerja pada tahun 2020 dan 2021. Hasil perbandingan capaian kinerja Biro Hukum dan Dumas pada tahun 2022 dapat ditampilkan pada Tabel berikut.

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Biro Hukum Dumas
Tahun 2020 s.d 2022

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas dukungan Hukum dan Pengaduan Masyarakat	Indeks kepuasan pengguna layanan bidang hukum	-	-	-	3,07	3,37	109%	3,09	3,20	103%
2		Persentase capaian pembentukan produk hukum	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90 %	100%	111 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%	100 %



4	Persentase Realisasi Anggaran Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat (Satker Dewan)	-	-	-	92 %	39.42 %	42%	92 %	99,77	108%
5	Persentase Realisasi Anggaran Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat (Satker Setjen)	-	-	-	92 %	98,94	107%	92 %	99,85	108%

Berdasarkan Perbandingan Capaian Kinerja Biro Hukum Dumas Tahun 2020 s.d 2022 pada Tabel 3.2 diatas, dapat dilakukan analisis sebagai berikut :

- 1) Terdapat beberapa Indikator Kinerja yang baru muncul pada tahun 2021 karena adanya perubahan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Bidang hukum dan Persentase Capaian Pembentukan Produk Hukum. Selain itu terdapat satu Indikator Kinerja yang muncul untuk mengukur efisiensi penggunaan sumberdaya yaitu Persentase realisasi Anggaran.
- 2) Indeks kepuasan pengguna layanan bidang hukum mengalami penurunan capaian di Tahun 2022, karena terdapat penambahan unsur layanan yang dinilai, namun capaian ini tetap memiliki realisasi melebihi target.
- 3) Persentase capaian pembentukan produk hukum memiliki capaian yang stabil, dengan realisasi sesuai target.
- 4) Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti memiliki capaian yang stabil, dengan realisasi sesuai target.
- 5) Persentase Realisasi Anggaran Biro Hukum dan Dumas (Satker Dewan) mengalami peningkatan capaian, dengan realisasi melebihi target di tahun 2022.



6) Persentase Realisasi Anggaran Biro Hukum dan Dumas (Satker Setjen) mengalami peningkatan capaian, dengan realisasi melebihi target di tahun 2022.

Dari analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Biro Hukum dan Dumas **cenderung mengalami tren naik**, dengan beberapa faktor pendorong kenaikan seperti Jumlah Perkara yang ditangani Biro Hukum dan Dumas mengalami kenaikan dari target 3 (tiga) perkara menjadi 15 (lima belas) perkara yang ditangani baik di Kota Jakarta, maupun di luar Kota Jakarta, terdapat 2 (dua) kali penyelenggaraan kegiatan untuk Peningkatan Kapasitas Analis Hukum yang diikuti Analis Hukum di Biro Hukum dan Dumas, *Benchmarking* yang dilaksanakan di beberapa daerah oleh Bagian Pembentukan Produk Hukum, Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum, dan Bagian Pengaduan Masyarakat. Kegiatan Konsinyering Pembahasan Pembentukan Produk Hukum Peraturan oleh Bagian Pembentukan Produk Hukum, serta pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Pembentukan Produk Hukum dan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum melalui Aplikasi Legalitas kepada Unit Kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Kemajuan capaian strategis berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah tahun 2024 hampir semua indikator kinerja telah mencapai kemajuan 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2024. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.3

Tabel 3.3
Kemajuan Capaian Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target 2024	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas dukungan Hukum dan Pengaduan Masyarakat	Indeks kepuasan pengguna layanan bidang hukum	3,20	3,30	96%



		Persentase capaian pembentukan produk hukum	100%	100%	100%
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang masih berproses mencapai target jangka menengah yaitu Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Bidang Hukum, dimana realisasi saat ini sebesar 3,20 masih kurang 0,1 poin dari target jangka menengah (target 2024) yaitu 3,30. Adapun langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan nilai pada setiap unsur yang dinilai indeks kepuasan layanan hukum sebagai berikut:

a. Waktu Penyelesaian Layanan

Perbaikan pada unsur waktu penyelesaian layanan dapat dilakukan dengan meningkatkan kecepatan dan kecermatan dalam memberikan layanan, membuat target waktu penyelesaian layanan, serta dapat menggunakan teknologi informasi yang dapat mempersingkat birokrasi dan waktu layanan.

b. Sarana dan Prasarana

Saran/rekomendasi untuk perbaikan sarana dan prasarana antara lain untuk meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam memberikan layanan hukum melalui pengembangan Legalitas (Aplikasi Pengajuan Pembentukan Produk Legal Terintegrasi), perlu adanya pembaharuan tampilan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) agar lebih menarik, serta perlu adanya ruangan yang dapat mendukung proses layanan hukum dapat berjalan dengan lancar dan efektif.

c. Persyaratan Pelayanan

Saran/rekomendasi terhadap unsur ini adalah dengan meningkatkan sosialisasi melalui berbagai media/kanal terkait standar operasional prosedur (SOP) dan mekanisme layanan hukum seperti Pembentukan/Perumusan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI,



perumusan Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian, evaluasi produk hukum Sekretariat Jenderal DPR RI, pemberian pertimbangan dalam menyusun Keputusan, advokasi (bantuan hukum) serta dokumen dan informasi hukum.

d. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Saran/rekomendasi untuk unsur ini adalah perlu adanya penyederhanaan mekanisme maupun prosedur dalam pemberian layanan yang memudahkan pengguna layanan, perlu adanya penambahan SDM agar dapat mempercepat layanan, serta perlu adanya pembaharuan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan hukum yang dapat mengakomodir kebutuhan pengguna layanan.

e. Kompetensi dan Perilaku SDM

Survei terhadap Kompetensi dan Perilaku SDM dilakukan dengan menilai profesionalitas SDM dan kompetensi SDM dalam memberikan layanan hukum. Saran/rekomendasi terkait kompetensi dan perilaku SDM adalah meningkatkan profesionalisme dan kompetensi pegawai melalui pelatihan-pelatihan, serta meningkatkan keramahan melalui 3 S (Senyum, Salam, Sapa) pada saat memberikan layanan.

f. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan antara lain meningkatkan respon terhadap aduan/saran/masukan yang disampaikan pengguna layanan serta menambah media/sarana untuk menyampaikan aduan/saran/masukan terkait layanan hukum.

g. Produk Spesifikasi Jenis Layanan

Upaya meningkatkan kepuasan unsur ini agar Biro Hukum dan Dumas terus meningkatkan kualitas produk layanan yang diberikan agar dapat memenuhi kebutuhan dan ekspektasi penerima layanan.

4. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.4
Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja



NO	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks kepuasan pengguna layanan bidang hukum	3,09	3,20 %	103 %
Analisis Keberhasilan/Kegagalan :		Kepuasan pengguna layanan hukum dengan indeks tertinggi pada unsur produk layanan. Unsur yang memperoleh nilai terendah adalah waktu penyelesaian layanan.		
Solusi atau Upaya yang Dilakukan :		Mempertahankan kualitas produk layanan dan mengupayakan efisiensi waktu penyelesaian layanan.		
2	Persentase capaian pembentukan produk hukum	100 %	100 %	100 %
Analisis Keberhasilan/Kegagalan :		Produk Hukum yang disusun sesuai dengan Target didukung dengan adanya Program Legislasi di Sekretariat Jenderal, evaluasi Produk Hukum, serta telah ditetapkannya Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Pembentukan Produk Hukum.		
Solusi atau Upaya yang Dilakukan :		Mempertahankan capaian pembentukan produk hukum.		
3	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %
Analisis Keberhasilan/Kegagalan :		Efisiensi penanganan Surat Pengaduan dengan adanya Aplikasi SIDUMAS dan SP4N LAPOR! Dibuatnya 1 (satu) SOP pengaduan masyarakat demi menunjang kinerja unit kerja serta keberhasilan pencapaian pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, yaitu SOP dengan judul "Pengelolaan Pengaduan Masyarakat yang ditujukan kepada Komisi / Badan Melalui surat dan website". dibuatnya Persekjen No.22 Tahun 2022 tentang pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat kepada DPR RI.		
Solusi atau Upaya yang Dilakukan :		Mempertahankan capaian penanganan Surat Pengaduan.		



4	Persentase Realisasi Anggaran Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat (Satker Dewan)	92 %	99,77	108%
Analisis Keberhasilan/Kegagalan :		Jumlah Perkara yang ditangani Biro Hukum dan Dumas mengalami kenaikan dari target 3 (tiga) perkara menjadi 15 (lima belas) perkara yang ditangani baik di Kota Jakarta, maupun diluar Kota Jakarta.		
Solusi atau Upaya yang Dilakukan :		Realisasi tergantung pada perkara yang masuk ke DPR RI, namun perlu memperbaiki SOP dan melaksanakan upaya preventif dalam penanganan perkara seperti menyediakan wadah untuk pelayanan advokasi litigasi dan non litigasi.		
5	Persentase Realisasi Anggaran Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat (Satker Setjen)	92 %	99,85	108%
Analisis Keberhasilan/Kegagalan :		Pelaksanaan kegiatan Biro Hukum dan Dumas sesuai <i>cash planning</i> dan <i>action plan</i> yang telah disusun pada awal tahun anggaran.		
Solusi atau Upaya yang Dilakukan :		Mempertahankan capaian realisasi Anggaran.		

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.5
Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Indikator Kinerja	Pencapaian Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Indeks kepuasan pengguna layanan bidang hukum	3,09	3,20	103%	Rp4.365.225.000,-	Rp.4.358.063.978,-	99,83%
2	Persentase capaian	100%	100%	100%			



	pembentukan produk hukum						
3	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%			

Dari tabel 3.5 diatas, dapat dilakukan analisis bahwa terhadap perbandingan persentase capaian kinerja dengan persentase capaian anggaran Biro Hukum dan Dumas berbanding lurus. Pencapaian Kinerja Tahun 2022 melebihi target kinerja dengan persentase capaian 103% dan 100%, terhadap realisasi anggaran sebesar 99,83%.

Menurut Pakar Peter F. Drucker (Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Kencana, 2010), cet ke-5, hlm 7), "*Efektif adalah mengerjakan pekerjaan yang benar (doing the right things), sedangkan efisien menurutnya adalah mengerjakan pekerjaan dengan benar (doing things right). efisien (daya guna) adalah penghematan man, money, material, methods, machines, marketing, minutes, and information dengan cara mengerjakan pekerjaan dengan benar, sedangkan efektif (hasil guna) adalah tingkat keberhasilan pencapaian tujuan (outcomes) dengan cara melakukan pekerjaan yang benar (do the right things)*". Dari pengertian efektif dan efisien, yakni terhadap daya guna dan hasil guna, Pencapaian Kinerja Tahun 2022 Biro Hukum dan Dumas melebihi target kinerja yang berbanding lurus dengan realisasi anggaran, sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja dari Biro Hukum dan Dumas Tahun 2022 telah efektif dan efisien.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Selanjutnya, dari sisi dukungan anggaran untuk Biro Hukum dan Dumas, untuk pagu anggaran pada tahun 2022 semula sebesar Rp. 4.671.555.000. (*Empat milyar enam ratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah*), terbagi dalam Satker Dewan sebesar Rp. **716.617.000,-** (*tujuh ratus enam belas juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah*) dan Satker Setjen sebesar Rp. **3.954.938.000,-** (*Tiga milyar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*). Dukungan anggaran untuk Biro Hukum dan Dumas ini mengalami beberapa revisi, kemudian setelah revisi yang terakhir diperoleh



pagu anggaran sebesar Rp.**4.365.225.000,-** (*Empat milyar tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*) yang terbagi dalam Satker Dewan sebesar Rp. **737.287.000,-** (*tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh tujuh rupiah*) dan Satker Setjen sebesar Rp. **3.627.938.000,-** (*Tiga milyar enam ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*).

Perbandingan pagu anggaran Biro Hukum dan Dumas tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3.6 di bawah ini :

Tabel 3.6
Persandingan Pagu Anggaran Biro Hukum dan Dumas
Tahun 2022

No	SATUAN KERJA	PAGU ANGGARAN			
		TAHUN 2021 <i>Sebelum revisi</i>	TAHUN 2021 <i>Setelah revisi</i>	TAHUN 2022 <i>Sebelum revisi</i>	TAHUN 2022 <i>Setelah revisi</i>
1.	Satker Dewan	1.501.286.000,-	522.422.000,-	716.617.000,-	737.287.000,-
2.	Satker Setjen	3.448.184.000,-	2.763.180.000,-	3.954.938.000,-	3.627.938.000,-
	JUMLAH	4.949.470.000,-	3.285.602.000,-	4.671.555.000,-	4.365.225.000,-

Sumber : Data Biro Keuangan, 2022.

Diketahui terjadi kenaikan pagu anggaran setelah revisi untuk anggaran tahun 2022 pada satker Dewan, dibanding tahun 2021 yaitu pada satker Dewan untuk tahun 2021 sebesar 522.422.000,- dan pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp. 737.287.000,- yaitu naik sebesar Rp. 214.865.000,- atau 29,14%.

Selain itu, pagu anggaran untuk Satker Setjen setelah revisi untuk anggaran tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi kenaikan, dimana pada anggaran satker Setjen tahun 2021 sebesar Rp. 2.763.180.000,- dan pada tahun anggaran 2022 menjadi sebesar yaitu 3.627.938.000,-, sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp. 864.758.000,- atau 23,84%.

Untuk melihat capaian atau realisasi pengelolaan anggaran Biro Hukum dan Dumas pada Tahun Anggaran 2022, maka disampaikan perbandingan pagu anggaran dengan realisasi anggaran pada empat triwulan sebagaimana Tabel 3.7 dan Tabel 3.8 sebagai berikut:



Tabel 3.7
Realisasi Pengelolaan Anggaran Satker Dewan
Selama Tahun Anggaran 2022

No	Biro Hukum dan Dumas	Satker Dewan		
		Pagu	Realisasi	%
1	Triwulan I	716.617.000,-	186.134.000,-	25,97
2	Triwulan II	716.617.000,-	397.262.000,-	55,44
3	Triwulan III	716.617.000,-	552.519.462,-	77,10
4	Triwulan IV	737.287.000,-	735.605.462,-	99,77
	Jumlah (revisi terakhir)	737.287.000,-	735.605.462,-	99,77

Sumber : Data Biro Hukum dan Dumas, 2022

Pada Satker Dewan Tahun 2022 dengan pagu sebesar Rp. 737.287.000,- telah terealisasi selama empat triwulan sebesar **Rp. 735.605.462,- atau 99.77%**.

Tabel 3.8
Realisasi Pengelolaan Anggaran Satker Setjen
Selama Tahun Anggaran 2022

No	Biro Hukum dan Dumas	Satker Setjen		
		Pagu	Realisasi	%
1	Triwulan I	3.327.938.000,-	939.330.250,-	28,23
2	Triwulan II	3.327.938.000,-	1.894.499.950,-	56,93
3	Triwulan III	3.627.938.000,-	2.349.686.206,-	64,77
4	Triwulan IV	3.627.938.000,-	3.622.458.516,-	99,85
	Jumlah(revisi terakhir)	3.627.938.000,-	3.622.458.516,-	99,85

Sumber : Data Biro Hukum dan Dumas, 2022.

Sedangkan pada Satker Setjen Tahun 2022 dengan pagu sebesar Rp. 3.627.938.000,- telah dapat direalisasikan selama empat triwulan sebesar **Rp. 3.622.458.516,- atau 99,85 %**.

Berdasarkan data pagu anggaran dan realisasi anggaran tersebut di atas dapat diberikan penjelasan bahwa terdapatnya penambahan anggaran di Satker Dewan dan Satker Setjen pada akhir Triwulan III, hal ini dikarenakan terserapnya anggaran secara optimal yang digunakan untuk penanganan perkara hukum perdata/tata usaha negara di Jakarta dan di luar Jakarta, kegiatan



peningkatan kapasitas analis hukum, serta sosialisasi Peraturan Sekretaris Jenderal tentang pembentukan produk hukum. Secara menyeluruh dapat disimpulkan bahwa penyerapannya sudah sangat baik dalam arti realisasi anggaran dapat dicapai dengan optimal.

Selanjutnya capaian realisasi anggaran Tahun 2022 secara rinci di Biro Hukum dan Dumas, Bagian Pembentukan Produk Hukum, Bagian Pertimbangan dan Dokumentasi Informasi Hukum dan Bagian Pengaduan Masyarakat sebagaimana tabel 3.9 dan 3.10 berikut ini.

Tabel 3.9

**Capaian Realisasi Anggaran Satker Dewan
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
Tahun Anggaran 2022**

No	Kegiatan	Satker Dewan		
		Pagu (Revisi Terakhir)	Realisasi	%
1	Anggaran Biro Hukum dan Dumas	-	-	-
2	Anggaran Bagian PPH	-	-	-
3	Anggaran Bagian PDIH	737.287.000,-	735.605.462,-	99,77
4	Anggaran Bagian DUMAS	-	-	-
	Jumlah(revisi terakhir)	737.287.000,-	735.605.462,-	99,77

Sumber : Data Biro Hukum dan Dumas, 2022.

Tabel 3.10

**Capaian Realisasi Anggaran Satker Setjen
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
Tahun Anggaran 2022**

No	Kegiatan	Satker Setjen		
		Pagu (Revisi Terakhir)	Realisasi	%
1	Anggaran Biro Hukum dan Dumas	1.548.855.000,-	1.547.887.360,-	99,94
2	Anggaran Bagian PPH	1.046.417.000,-	1.045.500.056,-	99,91
3	Anggaran Bagian PDIH	488.577.000,-	486.274.950,-	99,53
4	Anggaran Bagian DUMAS	544.096.000,-	542.798.150,-	99,76
	Jumlah (revisi terakhir)	3.627.938.000,-	3.622.458.516,-	99,85

Sumber : Data Biro Hukum dan Dumas, 2022.



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Hukum dan Dumas tahun 2022, menunjukkan bahwa seluruh target pada indikator kinerja dapat tercapai. Selanjutnya realisasi anggaran Biro Hukum dan Dumas tahun 2022 gabungan Satker Dewan dan Satker Setjen adalah sebesar **Rp.4.358.063.516,-** atau **99,83%** dari DIPA Tahun 2022 sebesar **Rp4.365.225.000,-**. Sedangkan untuk realisasi anggaran Satker Dewan yang dikelola Biro Hukum dan Dumas adalah **Rp735.605.462,-** atau **99,77%** dari DIPA tahun 2022 sebesar **737.287.000,-**. Kemudian untuk realisasi anggaran Satker Setjen adalah sebesar **Rp3.622.458.516,-** atau **99,85%** dari DIPA Tahun 2022 sebesar **3.627.938.000,-**

Selanjutnya upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Biro Hukum dan Dumas untuk memperbaiki kinerja Tahun 2022 dan menghadapi tantangan ke depan antara lain:

1. Sosialisasi terhadap layanan standar operasional prosedur (SOP) dan mekanisme Pembentukan produk hukum Sekretariat Jenderal DPR RI.
2. Pengembangan aplikasi legalitas yang memuat layanan evaluasi produk hukum Sekretariat Jenderal DPR RI.
3. Inventarisasi produk hukum Sekretariat Jenderal DPR RI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan pada saat ini sehingga dapat ditindaklanjuti melalui evaluasi produk hukum Sekretariat Jenderal DPR RI.
4. Perlu adanya sistem *tracking* produk hukum yang sudah ada untuk rekam jejak beserta produk hukum yang sudah dilakukan perubahan.
5. Memaksimalkan peluang koordinasi dan kerjasama dengan berbagai kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Dumas.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dan anggaran secara efisien dan efektif melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada *outcome* sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai, serta dirasakan manfaatnya oleh berbagai pihak/para pemangku kepentingan.
7. Koordinasi dengan Pustekinfo, Komisi/Badan, serta unit kerja lain yang menangani pengaduan masyarakat perlu ditingkatkan, terutama dalam upaya pengembangan aplikasi Sidumas



sehingga dapat membantu tugas DPR RI dalam menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dengan lebih optimal sehingga memberikan citra Dewan yang positif dimata masyarakat.

8. Mempercepat dan mengoptimalkan pengembangan sistem JDIH Setjen DPR RI (*jdih.dpr.go.id*) khususnya *website* JDIH Setjen DPR RI yang saat ini telah terintegrasi dengan JDIH Nasional dengan menampilkan inovasi berupa fitur atau menu baru serta kelengkapan metadata yang dapat memudahkan para pemangku kepentingan mendapatkan layanan informasi dan dokumentasi hukum melalui *Website* JDIH Setjen DPR RI yang lebih cepat, efisien dan efektif.
9. Prestasi yang telah dicapai antara lain dalam bidang pengelolaan anggaran dan sebagai anggota JDIHN perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

Jakarta, 3 Februari 2023

Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BIRO HUKUM DAN
PENGADUAN MASYARAKAT

Arini Wijayanti, S.H., M.H.





LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SATKER SETJEN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arini Wijayanti, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Sumariyandono, MPM.
Jabatan : Deputy Bidang Administrasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Maret 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Ir. Sumariyandono, MPM.
NIP. 19650618 198811 1 001

Arini Wijayanti, S.H., M.H.
NIP. 19710518 199803 2 010

REPUBLIK INDONESIA

